

Peran Dinas Pertanian dalam Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Organik di Kabupaten Agam

Nada Hayati¹, Lince Magriasti²

^{1,3}Universitas Negeri Padang, Indonesia

Article Info	Abstract
Article History Received 23 Agustus 2022 Published 9 November 2022	<i>Organic farming is a sustainable farming system using organic materials. Supporting organic agriculture in Indonesia cannot be separated from the role of the government to improve the welfare of the community. This study aims to determine the role of the Agricultural Service of Agam Regency in increasing the empowerment of organic rice groups in Nagari Kamang Mudiak, Kamang Magek District, Agam Regency. This research is a quasi-qualitative or quasi-qualitative research. Techniques and data collection were obtained through interviews and documentation studies. This study uses the theory according to Musa, the author examines the role of the Department of Agriculture in increasing the empowerment of organic farmer groups in Nagari Kamang Mudiak seen from three roles, namely 1) the role of the government as a regulator, 2) the role of the government as a dynamist, and 3) the role of the government as a facilitator. The results of this study indicate that the role of the Agricultural Service of Agam Regency in empowering organic rice farmer groups in Nagari Kamang Mudiak has not been optimal.</i>
Keywords: <i>The role of the Department of Agriculture, Empowerment of Farmer Groups, Organic Agriculture</i>	
Info Artikel	ABSTRAK
Article History Received 23 Agustus 2022 Published 9 November 2022	Pertanian organik merupakan sistem pertanian berkelanjutan dengan menggunakan bahan organik. Untuk mendukung pertanian organik di Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui peran Dinas Pertanian Kabupaten Agam dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok padi organik di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif semu atau quasi kualitatif. Teknik dan pengumpulan data didapatkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori menurut Musa, penulis meneliti tentang peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok tani organik di Nagari Kamang Mudiak dilihat dari tiga peran yaitu 1) peran pemerintah sebagai regulator, 2) peran pemerintah sebagai dinamisor, dan 3) peran pemerintah sebagai fasilitator. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam dalam memberdayakan kelompok tani padi organik di Nagari Kamang Mudiak belum optimal.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Nada Hayati

Universitas Negeri Padang, Padang

Email : nadahayati0320@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian atau sebagai petani. Berdasarkan data BPS Indonesia (2021) jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, dan 131,05 juta orang diantaranya masih bekerja. Dari data jumlah penduduk yang bekerja, pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai petani, yang terdiri atas 37,13 juta orang atau sekitar 28,33% dari jumlah orang yang bekerja

Pemerintah juga menetapkan bahwa pertanian merupakan prioritas utama dalam pembangunan di masa mendatang. Kebijakan untuk mendukung pengembangan sistem pertanian Indonesia pemerintah mengeluarkan sistem pertanian organik. Pertanian organik merupakan suatu sistem pertanian berkelanjutan dengan menggunakan bahan organik (Mayrowani, 2012)

Untuk mewujudkan pertanian organik di Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah dalam pemberdayaan petani. Dalam mewujudkan pertanian organik, pemerintah membuat suatu kumpulan petani yang memudahkan dalam memberikan arahan dan juga bantuan yang akan berdampak kepada keberhasilan pertanian organik yaitu kelompok tani (Imani, Charina, Karyani, & Wibawa Mukti, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 82 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani bahwasanya kelompok tani merupakan kumpulan petani, perternak, pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi dari lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, serta kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Pembentukan kelompok tani merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk memberdayakan para petani, melalui pembinaan dan penyuluhan.

Program pertanian organik sudah dijalankan di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu provinsi yang menerapkan pertanian organik adalah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mendukung keberhasilan pertanian organik Sumatera Barat, pemerintah provinsi mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No 520-24-2007 tentang pemebentukan Satgas Pertanian Organik dan pembentukan LSO (Lembaga Sertifikasi Organik). Untuk mendukung keberhasilan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, SK Gubernur tersebut dijadikan acuan dalam pengembangan pertanian organik di Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat. Hal ini juga menjadi acuan dari Pemkab Agam untuk menyerukan kepada petani untuk melakukan pertanian organik. Di Kabupaten Agam ada 4 Nagari yang telah melakukan pertanian organik, salah satunya adalah Nagari Kamang Mudiak. Kelompok tani organik di Kamang Mudiak ada 2 kelompok tani. Salah satu kelompok tani di Nagari Kamang Mudiak pernah meraih juara budidaya organik tingkat Sumatera Barat pada tahun 2017. Sehingga kelompok tani tersebut menjadi percontohan untuk kelompok tani lainnya yang ada di Kabupaten Agam. Mengingat besarnya potensi pertanian organik di Kamang Mudiak berbagai upaya telah dilakukan seperti memberikan pelatihan, pendampingan, bantuan dan lain sebagainya, tetapi bantuan yang diberikan belum maksimal, mengingat dalam pelaksanaan pemberdayaan pertanian padi organik masih mengalami berbagai masalah yang mengganggu pelaksanaan proses pemberdayaan. Permasalahan tersebut seperti masih kurangnya pelatihan yang diberikan terkait pengembangan dan pemasaran hasil pertanian, kurangnya sosialsai terkait dengan pengelolaan padi organik kepada masyarakat, kurangnya peralatan yang digunakan untuk pengolahan padi menjadi beras organik, yang menghambat dalam proses pengolahan padi organik. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada lagi hal yang menonjong dalam pertanian organik yang ada di Nagari Kamang Mudiak hingga tahun 2022

Selain dijalankan oleh kelompok tani, terdapat juga peran Dinas Pertanian berupa penyuluhan. Untuk penyuluh dari Dinas Pertanian di Nagari Kamang Mudiak, bergabung dengan 2 nagari lainnya yang ada di Kecamatan Kamang Magek. Terkait penyuluh pertanian di Kecamatan Kamang Magek tidak ada pembeda antara pertanian organik maupun non organik. Jika dilihat dari luas daerah Kecamatan Kamang Magek yaitu sekitar 99,6 KM. Dengan luas wilayah yang cukup besar, dua orang penyuluh ini dianggap tidak layak untuk melakukan penyuluhan yang ada di Kamang Magek. Namun praktek di lapangan jumlah penyuluh pertanian di Kecamatan Kamang Magek hanya 2 orang, sedangkan di Kamang Magek ada 3 nagari. Untuk wilayah Kamang Mudiak ini sendiri, dengan 2 orang penyuluh masih kurang, apalagi digunakan untuk satu kecamatan. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis memaparkan peran dari dinas pertanian dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok tani padi organik Nagari Kamang Mudia dan juga kendala yang dihadapi serta upaya apa saja yang dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif semu (quasi kualitatif). Dikatakan quasi kualitatif karena penelitian ini belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Menurut (Bungin, 2020). Metode penelitian quasi kualitatif sangat cocok diterapkan dalam menarasikan kehidupan sumber informasi yang diungkapkan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode Simple Research Design (SRD) yang merupakan sebuah desain sederhana dengan menggunakan paradigma postpositivism yang menggunakan 5 langkah dalam penelitian yaitu 1) Social context and research question (konteks sosial dan pertanyaan penelitian), 2) literature review (Tinjauan literatur), 3) Research methods and data collection (Metode penelitian dan pengumpulan data), 4) Data analysis (Analisis data), 5) Reporting (Melaporkan). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono,

2012). Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, catatan hasil wawancara, rekaman serta dokumentasi. Sedangkan data skunder berasal dari bahan pustaka literatur, penelitian terdahulu dan juga buku yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini penulis menentukan informan peneliti melalui purposive sampling . jumlah informan dalam penelitian ini ada 10 orang yang terdiri dari Kabid Tanam Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Kasi Pembenuhan Dan Perlindungan Tanaman Pangan, Kepala UPT BP3 Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Koordinator Penyuluh Kecamatan kamang Magek, Penyuluh Pertanian Kamang Mudiak, Wali Nagari Kamang Mudiak, Ketua Kelompok Tani Usaha Muda, Ketua Kelompok Tani Sawah Bangsa, dan juga petani organik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, karena data yang didapatkan berasal dari banyak sumber, sehingga teknik yang sesuai dengan penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan juga dokumentasi. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model dari Miles dalam (Sugiyono, 2012)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Pertanian dalam Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Tani Pertanian Padi Organik Regulator

Peran pertama yaitu regulator menyiapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pemberdayaan dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan-perundang undangan dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberdayaan. Untuk indikator pertama kebijakan pertanian organik. untuk kebijakan pertanian organik telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui PERMENTAN no 64 Tahun 2013 dan juga ada Keputusan Gubernur terkait dengan pembentukan LSO dan Satgas Pertanian organik. Untuk peraturan tentang peran pemerintah tentang pemberdayaan petani organik belum ada, hanya berlandaskan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan SK Gubernur. Hal yang sama dengan penelitian dari Indah, Jamhur, & Edison, (2021) bahwasannya untuk kebijakan peran dalam pemberdayaan hanya berlandaskan kepada Peraturan Menteri dan Undang-Unang

Indikator kedua kebijakan pertanian organik dan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah kabupaten. Untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah kabupaten memiliki peraturan sendiri yaitu Peraturan Bupati No 12 Tahun 2020 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pasal 42. Terkait dengan pertanian organik, pemerintah kabupaten Agam belum memiliki kebijakan atau aturan khusus pemerintah kabuapten menyerukan kepada masyarakat melalui dinas pertanian untuk melakukan pertanian organik dengan berpedoman kepada Permentan dan Keputusan gubernur. Dengan adanya kebijakan dapat menjadi acuan dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik menurut Raintung (2021). Apabila suatu kebijakan dapat berjalan lancar maka dapat dikatakan kebijakan tersebut berhasil. Sama halnya dalam kebijakan pertanian organik, ketika kebijakan tersebut berjalan lancar maka kebijakan tersebut dikatakan berhasil

Indikator keempat, bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan kebijakan pertanian organik. Kebijakan tentang pertanian organik, masyarakat tidak mengerti sama sekali. Masyarakat hanya berpedoman kepada apa yang diajarkan kepada mereka dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan kebijakan yang dibuat merupakan panduan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan juga kebijakan semata-mata dibuat untuk mengatur setiap kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani (Raintung, 2021). Untuk itu diperlukan pemahaman dari masyarakat petani itu sendiri agar petani tersebut mengerti apa kewajiban mereka dan apa yang hendak dicapai. Apabila petani tidak mengetahui tentang kebijakan yang ada, maka petani tidak memiliki tujuan yang jelas. Tentu saja hal tersebut menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri

Jadi terkait dengan peran pemerintah sebagai regulator dinilai belum maksimal, karena pemerintah kabupaten belum memiliki kebijakan tersendiri. Untuk pemberdayaan petani itu sendiri masih berpedoma kepada kebijakn dari pusat. Seharusnya ada kebijakan dari daerah

masing-masing, karena setiap daerah memiliki kebiasaan dan kehidupan yang berbeda dari daerah lainnya, dan juga daerah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan petani., dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan kebijakan dari pemberdayaan kelompok tani padi organik. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, maka tujuan yang ingin di capai oleh petani tidak jelas.

Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi semua pihak ketika terjadinya stagnasi dalam proses pemberdayaan Nurdin, Nurmaeta, & Tahir (2014). Dalam hal ini yang menjadi penggerak ketika terjadinya stagnasi adalah penyuluh. Pada penelitian ini penyuluh pertanian berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani

Pelatihan

Pelatihan merupakan bentuk dari pendidikan non formal yang berkaitan dengan cara-cara dalam melakukan pertanian dengan baik yang sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan petani Ali, Idris, & Parawangi (2014). Pertama model pelatihan kepada petani. Pelatihan yang diberikan kepada petani langsung dari tim penyuluh yang ada di kecamatan dengan cara memberikan materi dan juga praktek langsung. Untuk model pelatihan yang lebih cepat dicerna oleh masyarakat itu sendiri dalam model pelatihan yang langsung dipraktikkan langsung

Kedua, apakah model pelatihan efektif untuk mengembangkan kemampuan petani. untuk pengembangan kemampuan petani, petani cenderung lebih cepat mengerti dengan model langsung, sebab petani langsung turun tangan dan mengikuti langkah-langkah yang diajarkan. Sedangkan dalam penelitian menurut Nurdin et al (2014) model pelatihan yang penting adalah dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang efektif kepada masyarakat. bentuk dari pengarahan kepada petani yaitu dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Ketiga, kerjasama dengan pihak lain untuk pelatihan. Pelatihan kepada petani tidak hanya dilakukan oleh penyuluh saja tetapi ada keterlibatan pihak luar atau kerjasama dengan luar seperti pelatihan dari BMKG tentang iklim, dan pelatihan dari Bank Indonesia terkait dengan pertanian organik, selain itu juga ada dari LSO dan Satgas Pertanian. Dengan adanya pelatihan dari luar dapat menunjang kemampuan petani, sebab pengetahuan petani tidak hanya berasal dari penyuluh petani sebab kemampuan penyuluh juga terbatas. Dengan adanya pelatihan dari luar memungkinkan petani lebih memahami serta meningkatkan pengetahuan petani terhadap unsur-unsur dalam pertanian organik. Sama halnya ketika pelatihan dari BMKG, bahwasannya pelatihan tersebut memberikan arahan tentang curah hujan yang diperlukan dalam pengolahan pertanian organik

Keempat, jadwal pelatihan khusus yang diadakan oleh penyuluh. Jadwal pelatihan khusus yang diberikan penyuluh kepada petani, tidak ada. Penyuluh hanya melakukan pelatihan kepada petani ketika dibutuhkan oleh petani itu sendiri. Apabila petani tidak mengerti apa yang dikerjakan dan petani memintahkan tim penyuluh melakukan pelatihan, maka tim penyuluh akan langsung datang untuk melatih petani itu. Terkait dengan keterbatasan jumlah penyuluh dalam penelitian ini, maka tidak adanya jadwal khusus dari penyuluh. Hal tersebut akan berdampak kepada pengetahuan petani, sebab tidak adanya pelatihan yang secara rutin diberikan kepada petani itu sendiri

Pendampingan

Pendampingan merupakan perwujudan dalam pemberdayaan kelompok tani dengan suatu kegiatan yang menempatkan tenaga ahli di bidang pemberdayaan kelompok tani yang mampu berkomunikasi, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam masyarakat. Pertama, cara pendampingan yang dilakukan kepada petani. Pendampingan dilakukan, tim penyuluh mendampingi petani untuk mendapatkan sertifikat dan mendampingi petani dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk mendapatkan sertifikat diperlukan waktu selama 3 tahun. Pada saat itu petani harus benar-benar melakukan pertanian dengan menggunakan bahan organik. Ketika ada swah yang kedapatan menggunakan bahan kimia, maka sertifikat akan dibatalkan. Oleh karena itu diperlukan pendampingan dari penyuluh agar petani benar-benar melakukan pertanian organik

Kedua, apakah pendampingan yang dilakukan efektif untuk mengembangkan kemampuan petani. Pendampingan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana petani dapat melakukan

pekerjaannya, ketika petani memiliki hambatan dalam melakukan mengolah atau memasarkan pertanian organik, tim penyuluh mendampingi petani untuk menyelesaikannya. Pendampingan yang dilakukan dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan petani. pendampingan dilakukan ketika petani mengalami kesulitan, maka penyuluh mendampingi petani dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam penelitian ini pendampingan benar-benar berpengaruh terhadap kebutuhan petani, seperti halnya ketika petani membutuhkan pendampingan ketika membuat proposal. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki petani, petani tidak mampu dalam membuatnya sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari penyuluh untuk mendampingi petani.

Keempat, apakah ada jadwal pendampingan khusus kepada petani. untuk jadwal khusus pendampingan kepada petani, tidak memiliki jadwal khusus, ketika dibutuhkan penyuluh siap untuk mendampingi petani. Jadi untuk pelatihan maupun pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh, hanya dilakukan ketika diminta saja, tidak ada jadwal khusus yang diberikan oleh penyuluh untuk melatih maupun mendampingi petani dalam mewujudkan pemberdayaan petani. dalam penelitian ini tidak adanya jadwal khusus untuk mendampingi petani. Sebab jumlah penyuluh untuk mendampingi petani dalam melakukan pertanian organik tergolong sedikit. Sehingga penyuluh mendampingi petani ketika ada acara dan ketika dibutuhkan oleh petani

Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pemberdayaan Nurdin et al., (2014). Pertama, bantuan apa saja yang diberikan. Bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Agam berupa penyediaan bibit, pupuk dan juga bantuak berupa alat mesin pertanian yang digunakan oleh petani untuk memudahkan pengolahan pertanian mereka. Sebagai fasilitator pemerintah memiliki peran dalam memberikan saran dan prsarana yang dapat menunjang keberhasilan pertanian petani. dari pemerintah kabupetan seniri telah memberikan bantuan yang dapat menunjang kemampuan petani.

Kedua, bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan petani. bantuan yang diberikan oleh pemerintah masih minim. Petani masih membutuhkan bantuan peralatan lainnya untuk membantu petani dalam mengolah pertanian. Petani juga membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam memasarkan produk mereka. Pada saat ini petani hanya memasarkan padi mereka lewat pedagang-pedagang beras yang ada di daerah tersebut. Untuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah telah ada. Tetapi pada penelitian ini, fasilitas yang diberikan masih kurang, untuk kebutuhan pokok dalam pertanian masih kurang, apalagi untuk kebutuhan tambahan yang menunjang pemberdayaan patani.

Ketiga, bantuan yang diberikan berampak baik untuk meningkatkan pemberdayaan petani. mengingat bantuan yang diberikan oleh pemerintah masih kurang, maka bantuan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. karena kebutuhan dasar yang diperlukan petani untuk mengolah pertanian mereka belum ada. Jadi dapat dikatakan bahwasannya bantuan yang diberikan belum sepenuhnya berdampak baik untuk petani. sebab masih banyak bantuan yang diperlukan petani dari pamarintah belum dipenuhi oleh pemerintah

Jadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah masih minim. Sebab petani masih mengeluhkan permasalahan terkait dengan bantuan pemerintah. Dengan hal tersebut proses pengolahan pertanian mereka juga terganggu, yang megakibatkan hasil produksi tidak maskimal. Menurut Nurdin et al., (2014) bahwa peran merupakan terlaksanakan tugas atau fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka peran pemerintah atau dinas pertanian belum bejalan dengan maksimal

Kendala

Kendala Internal

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terdapat kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah. Terkait dengan pemberdayaan kelompok tani pertanian organik oleh Dinas Pertanian Kabupaten Agam menemukan kendala diantaranya. Untuk kendalah internal yaitu kendala dari dinas itu sendiri berupa kurangnya tenga penyuluh untuk mendampingi petani dalam mewujudkan pemberdayaan kelompok tani padi organik yang ada di Kamang Mudiak. Kendala tersebut

mengakibatkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat menjadi berkurang atau terhambatsudah dapat memenuhi kebutuhan petani. kebutuhan yang diberikan belum memenuhi kebutuhan petani, petani masih memerlukan bantuan lainnya untuk mendukunglah yang hendak dipecahkan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kendala yang menghambat program pemberdayaan petani organik di Nagari Kamang Mudiak berasal dari kendala internal memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan petani padi organik

Kendala Ekternal

Kendala ekternal dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani padi organik di Nagari Kamang Mudiak berasal dari petani itu sendiri. Kendala tersebut berupa masyarakat menanggapi bahwa pertanian organik itu terlalu ribet dan memakan banyak tenaga. Selanjutnya juga untuk bergabung kepada kelompok tani, mereka menganggap bahwa berabung ke kelompok tani hanya nambah pekerjaan dan buang-buang waktu. mereka tidak melihat manfaat yang timbul ketika melakukan pertanian organik dan bergabung ke kelompok tani.

Jadi dapat dikatakan bahwa kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani padi organik di Nagari Kamang Mudiak yang berasal dari kendala ekternal memberikan pengaruh yang tidak terlalu signifikan, namun tetap menjadi perhatian agar tidak menghambat proses pelaksanaan program pemberdayaan kelompok tani padi organik

Upaya

Internal

Untuk masalah internal, Dinas Pertanian Kabupaten Agam hanya memaksimalkan apa yang ada, mengingat untuk menambah lagi penyuluh membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dari Dinas Pertanian memaksimalkan pekerjaan penyuluh di Kabupaten Agam sesuai dengan target yang hendak dicapai.

Ekternal

Kendala ekternal yang berasal dari petani, melalui tim penyuluh Dinas Pertanian Kabupaten Agam berusaha melakukan pendekatan dengan petani untuk melakukan pertanian organik, dengan memberikan keyakinan kepada petani. Selanjutnya juga ketika melakukan pelatihan, dari tim penyuluh menyediakan makanan dan juga uang jajan untuk para petani yang mengikuti program pelatihan tersebut.

Dari kesimpulan menyeluruh bahwasannya peran, kendala dan upaya yang dipaparkan diatas Berdasarkan Peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Sugiyanta & Aziz (2016) bahwasannya peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penelitian ini belum dapat berjalan maksimal, sebab masih adanya kendala yang ada di setiap indikator-indikator peran tersebut. Sehingga dapat dinilai bahwasannya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani dinilai belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari segi regulaor yang mana kebijakan pertanian organik hanya berpedoman kepada pemerintah pusat, dan juga petani tidak mengetahui apa-apa soal kebijakan tersebut. Selanjutnya dari segi dinamisator, hambatan yang dialami adanya kekurangan penyuluh pertanian yang berdampak pada pelatihan dan juga pendampingan yang diberikan kepada petani. selanjutnya dari segi fasilitator masih kurangnya bantuan pokok yang dibutuhkan petani dalam menunjang pertanian mereka. Hal tersebut juga berdampak kepada kurang tertarik masyarakat petani untuk melakukan pertanian organik. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian juga belum maksimal dilihat dari prestasi kelompok tani di Kamang Mudiak yang mana sejak terakhir tahun 2017 mendapat penghargaan, hingga sekarang penghargaan tersebut tidak dapat diraih lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan pemberdayaan kelompok tani padi organik Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dinilai belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari peran Pemerintah dalam Pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Musa yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dn juga fasilitator belum terealisasikan sepenuhnya. Program pertanian organik merupakan salah satu program yang tepat untuk Nagari Kamang Mudiak mengingat Nagari Kamang Mudiak memiliki

potensi untuk dikembangkannya pertanian organik mengingat Nagari Kamang Mudiak memiliki lahan pertanian yang luas untuk dikembangkannya pertanian organik. Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pemberdayaan kelompok tani pertanian padi organik di Nagari Kamang Mudiak yaitu pertama kendala internal yang berasal dari Dinas Pertanian yaitu kurangnya tim penyuluh pertanian yang ada di lapangan, menyebabkan kurang optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat petani padi organik. kendala eksternal yang berasal dari masyarakat petani organik, yaitu kurang aktifnya masyarakat untuk melakukan pertanian organik karena pola pikir masyarakat yang masih rendah yang menanggapi bahwa bergabung ke kelompok tani hanya buang-buang waktu dan juga melakukan pertanian organik terlalu ribet. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan juga sumber dana yang dibutuhkan oleh Dinas Pertanian belum mencukupi sepenuhnya

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ibu Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si.

Bapak Ibu dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini

Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ali, S., Idris, M., & Parawangi, A. (2014). Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 79–91. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.82>

Bungin, B. (2020). Post-Qualitative Social Research Methods Kuamtitatif-Kualitaif-Mixed Methods; Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern. 2020: Kencana

Huberman, M. B. M. dan M. (1992). Analisis Data Kualitatif (T. R. Rohid (ed.)). Jakarta: UI-Press.

Imani, F., & dkk. (2018). Penerapan Sistem Pertanian Organik Di Kelompok Tani Mekar Tani Jaya Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 4(2).

Keputusan Gubernur No 520-24-2007 tentang pemebentukan Satgas Pertanian Organik dan pembentukan LSO (Lembaga Sertifikasi Organik).

Lexy J. Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mardikanto, T., & Soebinto, P. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Musa. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol.8 No.1.

Nuridin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 45–54.

Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/Ot.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani Dan Gabungan Kelompok Tani

Raintung, A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1, No.2(2), 1–9.

Sugiyanta, & Aziz, S. A. (2016). *Beras Dan Tanaman Pangan Organik Lainnya* (Vol. 1). Retrieved from [http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/83107/Beras Organik_Prof Sandra%2Bcover.pdf.pdf](http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/83107/Beras_Organik_Prof_Sandra%2Bcover.pdf.pdf)

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Website

<http://pphttp.tanamanpangan.pertanian.go.id/berita/85>

<https://sumbarsatu.com/berita/19548-pertanian-terpadu-dukung-pengembangkan-pertanian-organik-di-agam>

<https://www.binews.id/berita/5177/bank-indonesia-buka-sekolah-lapang-iklim-operasional.html>

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/647/pemerintah-dorong-peningkatan-sektor-pangan-dan-pertanian-untuk-kesejahteraan-masyarakat-indonesia>